



# **LAPORAN**

## **PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL**

### **OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEARSIPAN MELALUI PEMBANGUNAN TATALAKSANA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**NAMA : SITI WACHIDAH, S.Sos, M.Si**  
**N I P : 19700309 199603 2 002**  
**N D H : 09**

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN  
PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2019**



## **ABSTRAKSI**

### **OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEARSIPAN MELALUI PEMBANGUNAN TATALAKSANA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

**DISUSUN OLEH:**  
**SITI WACHIDAH, S.Sos, MSi**  
**NIP. 19700309 199603 2 002**  
**NDH: 09**

Ide dasar atas tersusunnya Proyek perubahan ini adalah berangkat dari diskusi dengan arsiparis dan pimpinan mengenai permasalahan – permasalahan penyelenggaraan kearsipan di Kota bekasii yang tak kunjung ada perubahan perbaikan yang signifikan. Perlu kerangka yang kuat untuk dapat mewujudkan cita – cita mewujudkan penyelenggaraan kearsipan dapat terstandar pada seluruh Perangkat Daerah dan mendapatkan indeks kearsipan yang memuaskan. Atas dasar tugas pokok dan fungsi pada bidang Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan Kota Bekasi, yaitu memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengembangan kearsipan, pengawasan kearsipan perangkat daerah serta pengawasan kearsipan perusahaan, organisasi kemasyarakatan/organisasi politik dan masyarakat untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bahwa penyelenggaraan Kearsipan adalah penyelenggaraan pada seluruh Perangkat Daerah yang mana pada masing – masing Perangkat Daerah terdapat Record Center, Arsiparis dan SDM kearsipan atau dengan sebutan lain dan sarana prasarana kearsipan. Disamping itu juga terdapat Depo Arsip dibawah kendali Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang dalam hal ini adalah Dinas Kearsipan. Keseluruhan itu merupakan satu sistem kerja yang harus memiliki aturan ketatalaksanaan yang standar, sama dan jelas guna diikuti oleh seluruh yang terkait dengan penyelenggaraan kearsipan sehingga pengkoordinasian menjadi lebih mudah, efisien dan efektif.



Kebutuhan akan hal tersebut mutlak diperlukan dan menjadi pondasi untuk dapat mewujudkan tujuan utama Dinas Kearsipana yakni

- Terwujudnya Tata Kelola Kearsipan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi

Tahapan penyusunan proyek perubahan dilakukan dalam 3 fase yakni **jangka pendek** pada tataran persiapan, koordinasi stakeholder dan penyusunan tim efektif; **jangka menengah** dengan kegiatan pembahasan – pembahasan materi perubahan, penyusunan rancangan perubahan dan penetapan proyek perubahan oleh Wali Kota; dan selanjutnya **jangka panjang** berupa sosialisasi kepada stake holders dan masyarakat tentang tatalaksana penyelenggaraan kearsipan.

Sebagai pelaksanaan tupoksi Bidang Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan dan bersinergi dengan Visi, Misi dan Tujuan Dinas Kearsipan maupun RPJMD Kota Bekasi Proyek perubahan dirancang dengan tujuan sebagai berikut :

1. Agar tersusun pedoman penyelenggaraan kearsipan di Kota Bekasi
  2. Agar pelaku penyelenggara kearsipan dan Arsip yang dikelola memiliki perlindungan dan kekuatan hukum
  3. Meningkatkan pelayanan kearsipan kepada masyarakat.
-